

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## 624 KJMU Diduga Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA - Setelah dicek data, sebanyak 624 pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), diduga tidak tepat sasaran. Menurut Kepala Disdukcapil Jakarta, Budi Awaluddin, Selasa (12/3) saat ini total ada 19.000 lebih pemegang KJMU.

"Dari jumlah 19.999, sebanyak 624 tak sesuai dengan tiga parameter pemadanan data. Salah satunya dokumen kependudukan terkait domisili. Itu temuan sementara berdasarkan pemadanan data. Mereka ini perlu dicek kembali," tutur Budi.

Lebih jauh Budi, menjelaskan, parameter pemadanan data, selain berdasarkan padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai dengan domisili, juga data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpusat. Kemudian, pekerjaan kepala keluarga (KK) penerima KJMU.

Untuk itu, Budi berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov Jakarta bisa tepat sasaran. Budi merinci dari 624 orang, sebanyak 577 perlu diverifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai dengan domisili.

Ini antara lain karena pin-

dah ke luar Jakarta (329 orang), tidak dikenal (125), dikenal, namun tidak diketahui keberadaannya (119), dan RT tidak ada (4). Selanjutnya, 33 orang berdasarkan pekerjaan KK tidak berpenghasilan rendah. Mereka ada dosen, karyawan BUMN/BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi negara.

Lalu, 14 orang lainnya tidak sesuai dengan berdasarkan padanan data SIAK Terpusat. Merujuk tiga parameter tersebut, padanan data kependudukan sesuai dengan domisili paling banyak. Maka, Budi mengimbau agar warga tertib administrasi kependudukan.

Warga bisa memeriksa status NIK-nya aktif atau tidak melalui <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/>. Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen untuk terus melanjutkan program KJMU. Ini salah satu bentuk bantuan sosial bidang pendidikan. Bansos ini merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

"Namun, bansos ini sifatnya selektif dan sementara. Artinya, diberikan tidak terus menerus.

Kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan," tandas Budi.

Lebih jauh Budi mengutarakan, sebagai bagian dari langkah selektif, Pemprov menetapkan sejumlah criteria. Selain itu, Pemprov juga melakukan pemadanan data. Tujuannya, untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak menerima.

Dinas Pendidikan berwenang melakukan verifikasi data yang diberikan oleh mahasiswa ketika mendaftar sebagai penerima KJMU. Salah satunya dengan memeriksa langsung ke lapangan. ■ **Ant/G-1**